



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 44/SEK/KP1.1.7/I/2025  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Verifikasi status PPNPN yang telah dinyatakan  
Lulus Seleksi PPPK

Jakarta, 14 Januari 2025

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di –

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi Nomor 56/SEK/PENG.KP1.1.7/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*Database*) BKN di Lingkungan Mahkamah Agung RI, dalam rangka pemutakhiran data PPNPN yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK, perlu dilakukan verifikasi dan validasi terkait status PPNPN tersebut pada masing-masing satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Verifikasi dan validasi data terkait status PPNPN pada masing-masing satuan kerja bertujuan untuk mendata PPNPN yang sudah tidak aktif bekerja pada satuan kerjanya sebagaimana pengumuman kelulusan hasil seleksi PPPK di atas;
2. Hasil verifikasi dan validasi bagi PPNPN yang masih aktif digunakan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai tahapan lanjutan dalam pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*Database*) BKN di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan melalui aplikasi SIKEP Mahkamah Agung dengan menggunakan akun "Validator Satker" (*petunjuk penggunaan sistem terlampir pada Lampiran I*);
4. Masing-masing satuan kerja memverifikasi PPNPN yang sudah tidak aktif pada satuan kerjanya dengan dilengkapi surat keterangan (*format terlampir pada Lampiran II*) dan Keputusan Pemberhentian PPNPN yang bersangkutan;



5. Pimpinan satuan kerja bertanggung jawab penuh terhadap verifikasi dan validasi status PPNPN yang sudah tidak aktif, sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi ini harus dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel;
6. Pelaksanaan verifikasi dan validasi status PPNPN yang sudah tidak aktif paling lambat dilaporkan sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.



Lampiran I  
Surat Sekretaris Mahkamah Agung  
Nomor : 44/SEK/KP1.1.7/I/2025  
Tanggal : 14 Januari 2025

**PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM VERIFIKASI DAN VALIDASI PPNPN  
MELALUI SIKEP**



# Konfirmasi Validasi Status PPNPN Pasca Seleksi PPPK Tahap I Tahun Anggaran 2024

Dalam rangka mendapatkan data terkini status PPNPN yang telah lolos Seleksi PPPK MA RI Tahap I tahun anggaran 2024 pada Mahkamah Agung dan satuan kerja pada 4 lingkungan peradilan, maka validator satker/pusat perlu melakukan konfirmasi status PPNPN pada menu Pendataan Tenaga Non ASN di SIKEP, dengan cara sebagai berikut :

1. Membuka menu Pendataan Tenaga Non ASN pada SIKEP menggunakan akun validator satker/pusat.
2. Klik tombol edit, untuk melakukan update status terkini pada PPNPN yang lolos seleksi PPPK Tahap I tahun anggaran 2024 dan sudah tidak aktif bekerja pada satuan kerja.

#	NIK	NAMA	MASA KERJA	JABATAN	UNIT KERJA	STATUS PPNPN	STATUS	AKSI
1			16 Tahun 0 Bulan	Pramubakti	Subbagian Rencana Anggaran II Badan Urusan Administrasi	Masih Aktif & Lolos Seleksi	Tersetujui	
2			11 Tahun 6 Bulan	Pengemudi	Subbagian Pengangkutan dan Perjalanan Dinas Badan Urusan Administrasi	Masih Aktif & Lolos Seleksi	Tersetujui	
3			5 Tahun 0 Bulan	Pramubakti	Panitera Muda Pidana Khusus Kepaniteraan	Sudah Tak Aktif & Lolos Seleksi	Tersetujui	
4			5 Tahun 5 Bulan	Pramubakti	Seksi Tata Naskah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Masih Aktif & Lolos Seleksi	Tersetujui	
5			10 Tahun 10 Bulan	Pramubakti	Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Masih Aktif & Lolos Seleksi	Tersetujui	

3. Pilih status, kemudian klik tombol **Simpan**.
  - **Sudah Tak Aktif & Lolos Seleksi** apabila PPNPN yang lolos Seleksi PPPK Tahap I saat ini sudah tidak aktif bekerja pada satuan kerja.
  - **Masih Aktif & Lolos Seleksi** apabila PPNPN yang lolos Seleksi PPPK Tahap I saat ini masih aktif bekerja pada satuan kerja

**Konfirmasi Status PPNPN Terakhir**

Status PPNPN

Masih Aktif & Lolos Seleksi

Pilih Status PPNPN

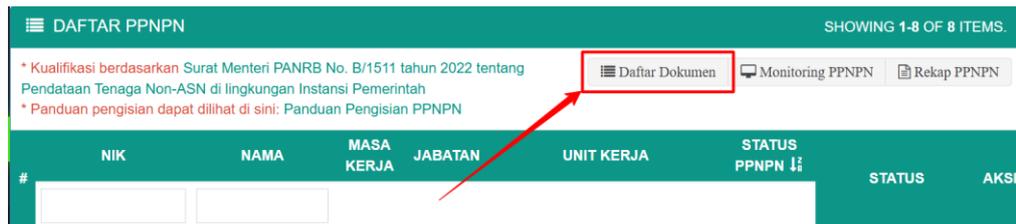
Sudah Tak Aktif & Lolos Seleksi

Masih Aktif & Lolos Seleksi

Simpan

4. Setelah melakukan konfirmasi pada seluruh PPNPN yang lolos Tahap I di SIKEP dan **apabila terdapat PPNPN yang tak aktif**, klik tombol **Daftar Dokumen** untuk mengunggah dokumen Surat Keterangan Tak Aktif yang

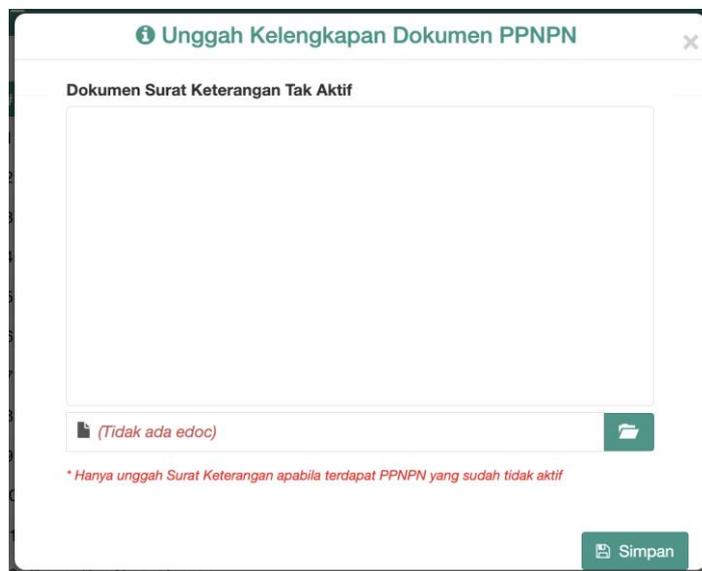
menyatakan bahwa terdapat PPNPN yang lolos Seleksi PPPK Tahap I akan tetapi sudah tidak aktif bekerja.



5. Pada Halaman Daftar Dokumen Kelengkapan PPNPN Satuan Kerja, klik tombol **Unggah Dokumen** seperti gambar berikut



6. Unggah dokumen Surat Keterangan Tak Aktif sesuai format yang ada dalam bentuk .pdf dan maksimal ukuran file 1MB, kemudian klik **Simpan**



7. Setelah berhasil tersimpan, klik tombol ikon dokumen paling kanan untuk melakukan pratinjau dokumen yang telah diunggah.



## KOP SURAT UNIT KERJA

### SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi Nomor 56/SEK/PENG.KP1.1.7/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Eks Tenaga Honoror Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*Database*) BKN di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di bawah ini:

Nama : <<nama\_ppnp>>  
Tempat/Tanggal Lahir : <<tgl\_ppnp>>  
NIK : <<nik\_ppnp>>  
Jabatan : <<jabatan\_ppnp>>  
Unit Kerja : <<unit\_kerja>>

sudah **tidak aktif bekerja** sebagai PPNPN pada <<unit\_kerja>> sejak tanggal <<tmt\_pemberhentian>> sebagaimana Surat Keputusan Pemberhentian PPNPN yang terlampir pada surat keterangan ini.

Surat keterangan ini dibuat untuk membatalkan proses pengusulan Nomor Induk PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara bagi yang bersangkutan. Saya bertanggung jawab penuh terhadap surat keterangan ini, apabila di kemudian hari ternyata keterangan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<<kota>>, <<tanggal>>  
<<Pimpinan\_Unit\_Kerja>>,

TTD dan Meterai 10.000  
serta dibubuhi **stempel**

<<NAMA>>  
<<NIP/NRP>>

Mengetahui,

Sekretaris Pengadilan <<unit\_kerja>>,

Panitera Pengadilan <<unit\_kerja>>,

<<NAMA>>  
<<NIP/NRP>>

<<NAMA>>  
<<NIP/NRP>>

\* Format untuk Unit Kerja Pengadilan yang jumlah PPNPN tidak aktifnya sebanyak 1 (satu) orang



# KOP SURAT UNIT KERJA

## SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi Nomor 56/SEK/PENG.KP1.1.7/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*Database*) BKN di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di bawah ini:

Nama : <<nama\_ppnp>>  
Tempat/Tanggal Lahir : <<tgl\_ppnpn>>  
NIK : <<nik\_ppnp>>  
Jabatan : <<jabatan\_ppnp>>  
Unit Kerja : <<unit\_kerja>>

sudah **tidak aktif bekerja** sebagai PPNPN pada <<unit\_kerja>> sejak tanggal <<tmt\_pemberhentian>> sebagaimana Surat Keputusan Pemberhentian PPNPN yang terlampir pada surat keterangan ini.

Surat keterangan ini dibuat untuk membatalkan proses pengusulan Nomor Induk PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara bagi yang bersangkutan. Saya bertanggung jawab penuh terhadap surat keterangan ini, apabila di kemudian hari ternyata keterangan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<<kota>>, <<tanggal>>  
<<Pimpinan\_Unit\_Kerja>>,

TTD dan Meterai  
10.000 serta dibubuhi  
**stempel**

<<NAMA>>  
<<NIP/NRP>>

**\* Format untuk Unit Kerja Pusat yang jumlah PPNPN tidak aktifnya sebanyak 1 (satu) orang**



# KOP SURAT UNIT KERJA

## SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi Nomor 56/SEK/PENG.KP1.1.7/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*Database*) BKN di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di bawah ini:

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	NIK	Jabatan	TMT Pemberhentian
1					
2					
dst					

sudah **tidak aktif bekerja** sebagai PPNPN pada <<unit\_kerja>> sebagaimana Surat Keputusan Pemberhentian PPNPN yang terlampir pada surat keterangan ini.

Surat keterangan ini dibuat untuk membatalkan proses pengusulan Nomor Induk PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara bagi yang bersangkutan. Saya bertanggung jawab penuh terhadap surat keterangan ini, apabila di kemudian hari ternyata keterangan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<<kota>>, <<tanggal>>

<<Pimpinan\_Unit\_Kerja>>,

TTD dan Meterai  
10.000 serta  
dibubuhi **stempel**

<<NAMA>>

<<NIP/NRP>>

Mengetahui,

Sekretaris Pengadilan <<unit\_kerja>>,

Panitera Pengadilan <<unit\_kerja>>,

<<NAMA>>

<<NIP/NRP>>

<<NAMA>>

<<NIP/NRP>>

**\* Format untuk Unit Kerja Pengadilan yang jumlah PPNPN tidak aktifnya lebih dari 1 (satu) orang**



# KOP SURAT UNIT KERJA

## SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi Nomor 56/SEK/PENG.KP1.1.7/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*Database*) BKN di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di bawah ini:

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	NIK	Jabatan	Unit Kerja	TMT Pemberhentian
1						
2						
dst						

sudah **tidak aktif bekerja** sebagai PPNPN sebagaimana Surat Keputusan Pemberhentian PPNPN yang terlampir pada surat keterangan ini.

Surat keterangan ini dibuat untuk membatalkan proses pengusulan Nomor Induk PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara bagi yang bersangkutan. Saya bertanggung jawab penuh terhadap surat keterangan ini, apabila di kemudian hari ternyata keterangan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<<kota>>, <<tanggal>>

<<Pimpinan\_Unit\_Kerja>>,

TTD dan Meterai  
10.000 serta  
dibubuhi **stempel**

<<NAMA>>

<<NIP/NRP>>

\* Format untuk Unit Kerja Pusat yang jumlah PPNPN tidak aktifnya lebih dari 1 (satu) orang

Sekretaris Mahkamah Agung,



Sugiyanto

